

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DI DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN PINANG RAYA
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Oleh :

Karisma Juliana*, Suratman, Yorry Hardayani

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu Indonesia

*Email Korespondensi: karismajuliana@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab belum optimalnya penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan pedoman BPKP tentang Aplikasi Siskeudes dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Empat aspek utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap penatausahaan, dan tahap pelaporan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara belum terlaksana secara optimal, karena pada aspek tahap perencanaan dan tahap penatausahaan mengalami hambatan yakni masyarakat belum paham mengenai RPJM Desa, Pembangunan RKP tidak sesuai dengan regulasi dana desa berjalan dan berita acara serta surat pesanan belum diintegrasikan ke dalam aplikasi siskeudes.

Kata Kunci: Aplikasi Siskeudes, Keuangan Desa, Pengelolaan

Abstract

The purpose of this study is to describe the causes of the suboptimal implementation of village financial system applications (siskeudes) in Bukit Makmur Village, Pinang Raya District, North Bengkulu Regency. This research uses BPKP guidelines on Siskeudes Application and Law Number 17 of 2003 concerning State Financial Management. The four main aspects that are the focus of this study are the planning stage, the budgeting stage, the administration stage, and the reporting stage. The method used is a descriptive qualitative method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the implementation of the village financial system application (siskeudes) in Bukit Makmur Village, Pinang Raya District, North Bengkulu Regency has not been carried out optimally, because in the aspects of the planning stage and the administration stage, there are obstacles, namely the community does not understand about the Village RPJM, the development of RKP is not in accordance with the current village fund regulations and minutes and order letters have not been integrated into the siskeudes application.

Keywords: Siskeudes Application, Village Finance, Management

A. Pendahuluan

Keuangan negara adalah bagian yang penting dalam suatu negara, karena lembaga ini berkaitan erat dengan tujuan negara dan bagaimana kas negara yang diisi dari uang rakyat itu dikelola untuk memutar roda pemerintahan dan Pembangunan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga desa telah diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta

pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa (Faizah & Sari, 2022).

Pengelolaan keuangan dana desa secara umum masih banyak kendala atau masalah yang terjadi terkait laporan keuangan desa seperti sering terjadinya keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan, masih lemahnya skill (keterampilan) terkait laporan keuangan, masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi seperti jaringan internet yang lambat serta laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara desa yang selama ini masih dilakukan secara manual.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di tahun 2015 dengan di dukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 (BPKP, 2018).

Pada tabel 1 berikut dapat dilihat data desa yang telah menggunakan aplikasi siskeudes di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023.

Tabel 1. Data Desa Pengguna Aplikasi Siskeudes

No	Desa	Tahun	Desa IDM	Rangking
1.	Air Sebayur	2016	Berkembang	9
2.	Air Sekamanak	2016	Maju	3
3.	Air Simpang	2016	Berkembang	10
4.	Bukit Harapan	2016	Maju	4
5.	Bukit Makmur	2016	Maju	1
6.	Bumi Harjo	2016	Maju	6
7.	Gunung Payung	2016	Berkembang	8
8.	Marga Bhakti	2016	Maju	2
9.	Sumber Mulya	2016	Maju	5

No	Desa	Tahun	Desa IDM	Rangking
10.	Tanjung Muara	2016	Berkembang	7

Sumber: Idm.Kemendesa

Desa Bukit Makmur merupakan salah satu desa dari 10 desa di Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2016 untuk hal pengelolaan keuangan desa baik bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa (DD) dibawah naungan pemerintah pusat.

Pada tabel 2 berikut dapat dilihat jumlah dana desa untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Makmur pada tahun 2023.

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Makmur

Uraian	Anggaran
Pendapatan	Rp. 1. 462. 519. 720, 00
Jumlah Belanja	Rp. 1. 471. 279. 720, 00
Surplus/ (Defisit)	Rp. (8.760.000,00)
Penerima Pembiayaan	Rp. 8.760.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 8.750.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Sumber: APBDesa Bukit Makmur

Berdasarkan tabel 1.2 diatas maka dapat diketahui bahwa dana desa juga tersalurkan dalam jumlah yang besar di Desa Bukit Makmur yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa, bidang pelaksanaan Pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Jumlah dana desa yang besar ini dikelola dengan baik sehingga dapat teroptimalkan. Peningkatan anggaran yang dialokasikan diharapkan akan meningkatkan perekonomian desa, yang dapat mendukung perekonomian nasional di masa depan (Dewi dan kawan-kawan 2021).

Berdasarkan pedoman BPKP Aplikasi Siskeudes dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara serta dalam Pemandagri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Aplikasi Siskeudes yang terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan/pertanggung jawaban (pembukuan).

Tahap Perencanaan adalah menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahap perencanaan ini, pemerintah Desa Bukit Makmur melakukan kegiatan musrenbangdes/mudes untuk meminta partisipasi masyarakat terkait dengan rencana Pembangunan.

Dalam tahap perencanaan ini pemerintah Desa Bukit Makmur sudah melakukan musyawarah desa dengan beberapa pihak berkepentingan terdahulu melalui Musrengbag Desa guna mendengarkan aspirasi masyarakat

terkait usulan program yang diajukan oleh masyarakat. Setelah dilakukan musyawarah, maka pemerintah desa akan mereview RPJMDesa bersama tim RKP apabila sudah baik akan dituangkan menjadi RKPDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah itu akan dilakukan penginputan ke dalam aplikasi siskeudes mengenai apa saja program yang akan di rencanakan dan dianggarkan.

Tahap perencanaan ini belum berjalan secara optimal dikarenakan masyarakat belum paham tentang RPJM Desa dan Pembangunan RKP tidak sesuai dengan regulasi dana desa berjalan. Oleh karena itu, masyarakat kurang mengerti tentang tujuan, prioritas, dan program pembangunan yang tercakup dalam RPJM Desa Bukit Makmur.

Tahap peganggaran akan dilakukan apabila peraturan desa terkait APBDes telah ditetapkan. Pada tahap peganggaran ini, operator akan memasukkan data sesuai dengan apa yang akan dianggarkan dalam rencana program kerja yang sudah disetujui. Dengan menggunakan siskeudes, pemerintah desa bukit makmur dapat mencatat setiap transaksi, memonitor realisasi anggaran, serta menyajikan laporan keuangan secara lebih akurat dan teukur kepada instansi terkait dan masyarakat.

Kemudian pada tahap penatausahaan yaitu merupakan pelaksanaan anggaran APBDes. Tahap penatausahaan meliputi pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pencairan dan Pertanggungjawaban sudah ada di aplikasi siskeudes. pada tahap penatausahaan ini sudah dilakukan

denagan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam penginputan setiap transaksinya dan pengajuan Surat permintaan pembayaran (SPP) untuk berita acara dan surat pesanan masih dilakukan secara manual dan belum diintegrasikan ke dalam aplikasi siskeudes.

Kepala Desa Bukit Makmur membenarkan bahwa dalam pengajuan surat pembayaran untuk berita acara dan surat pesanan masih dilakukan secara manual. Dalam melakukan penginputan, dibutuhkan ketelitian karena setiap data yang diinput harus sesuai untuk setiap bidangnya seperti belanja pemerintahan desa, Pembangunan, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Jika ada kesalahan dalam penginputan data maka akan berpengaruh terhadap bagian yang lainnya. Oleh karena itu pada tahap ini akan memakan waktu yang lama dan ketelitian dalam penginputan data ke aplikasi siskeudes.

Selanjutnya di tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah terlaksana, dimana Kantor Desa Bukit Makmur telah menggunakan aplikasi siskeudes pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban seperti CaLKA dan Laporan Pembukuan sesuai dengan Pedoman BPKP Siskeudes. Dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi siskeudes sudah cukup efektif karena di Desa Bukit Makmur sendiri semua tahapan sudah dilakukan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan pihak yang membutuhkan.

Oleh karena itu, mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memahami secara mendalam terkait penyebab belum optimalnya Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, aspek yang dianalisis berdasarkan pedoman BPKP BPKP dan UU NO.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Serta Dasar Hukum pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Aplikasi Siskeudes pada peraturan pengelolaan keuangan desa, maka fokus penelitian ini terbagi menjadi 4 aspek utama: yaitu tahapan pengelolaan aplikasi siskeudes yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan/pertanggung jawaban (pembukuan).

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang paling memahami dan terlibat langsung dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Bukit Makmur. Berdasarkan kriteria yang diuraikan diatas, maka informan yang dipilih

pada penelitian ini yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Desa Bukit Makmur, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tahap Perencanaan

Merekam Data Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahap perencanaan, pemerintah desa bukit makmur akan menyusun perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran dari visi-misi desa yang memuat arah kebijakan Pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan empat kegiatan Pembangunan desa.

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi dan wawancara bahwa Penerapan Aplikasi Siskeudes pada tahap perencanaan mengacu pada RPJMDes dan pemerintah desa bukit makmur akan menyusun perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa

merupakan dokumen rujukan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus disusun setiap tahun dimulai bulan juli tahun berjalan, untuk menjamin keberlanjutan Pembangunan di desa, dokumen RKP Desa harus disusun berdasarkan RPJM Desa yang telah disusun sebelumnya. Karena dokumen RKP Desa akan menjadi dasar untuk penyusunan APBDes, maka dokumen RKP Desa Bukit Makmur harus telah ditetapkan pada bulan September tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa pada tahap perencanaan desa bukit makmur pada aplikasi siskeudes seperti merekam data umum dan RPJMdesa serta RKP Desa sudah sesuai dengan buku pedoman (BPKP) siskeudes. Dalam penginputan di tahap perencanaan ini pemerintah Desa Bukit Makmur sudah melakukan musyawarah desa dengan beberapa pihak berkepentingan terdahulu melalui Musrenbag desa guna mendengarkan aspirasi masyarakat terkait usulan program yang diajukan oleh masyarakat.

Tahap Penganggaran

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes)

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah proses perencanaan dan alokasi dana untuk memperkirakan pendapatan yang akan diterima dan mengatur pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat desa. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilakukan

secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada tahap penganggaran yaitu Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Aplikasi Siskeudes, apabila Anggaran dana desa sudah turun maka pihak yang terlibat seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa harus langsung memasukkan kegiatan-kegiatan yang ada di Rencana Kerja Pemerintah atau RKP ke dalam Aplikasi Siskeudes agar dapat mengelola dan melacak penggunaan dana dengan tepat.

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang di tetapkan dalam peraturan kepala desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa tahap penganggaran yang meliputi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sudah dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi siskeudes. Proses penganggaran ini akan dilakukan apabila peraturan desa terkait APBDes telah ditetapkan. Pada tahap penganggaran ini, operator akan memasukkan data sesuai dengan apa yang akan dianggarkan dalam rencana program kerja yang sudah disetujui. Pada menu kegiatan juga dilakukan untuk memilih dan melakukan penginputan

data bidang, sub bidang, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan langsung oleh operator untuk penginputan pada aplikasi siskeudes sesuai dengan dokumen yang akan diinput. Dengan menggunakan siskeudes, pemerintah desa bukit makmur dapat mencatat setiap transaksi, memonitor realisasi anggaran, serta menyajikan laporan keuangan secara lebih akurat dan teukur kepada instansi terkait dan masyarakat.

Tahap Penatausahaan

Pengajuan SPP

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDDesa atau peraturan desa tentang APBDDesa perubahan permintaan pembayaran (SPP) melalui pengajuan surat. Dalam tahap penatausahaan terdapat berita acara dan surat pesanan yang memiliki peran penting.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat dilapangan bahwa pada tahap penatausahaan mengenai pengajuan Surat permintaan pembayaran (SPP) untuk berita acara dan surat pesanan masih dilakukan secara manual dan belum diintegrasikan ke dalam aplikasi siskeudes.

Pencairan dan Pertanggungjawaban

Pencairan dan Pertanggungjawaban dana dalam tahap penatausahaan sangat penting untu memastikan bahwa dana desa di Desa Bukit Makmur dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan , bahwa di tahap penatausahaan yang meliputi pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pencairan dan Pertanggungjawaban sudah ada di aplikasi siskeudes .Dapat diketahui bahwa pada tahap penatausahaan ini sudah dilakukan denagan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam penginputan setiap transaksinya dan pengajuan Surat permintaan pembayaran (SPP) untuk berita acara dan surat pesanan masih dilakukan secara manual dan belum diintegrasikan ke dalam aplikasi siskeudes. . Dalam melakukan penginputan, dibutuhkan ketelitian karena setiap data yang diinput harus sesuai untuk setiap bidangnya seperti belanja pemerintahan desa, Pembangunan, pemberdayaan, dan lain sebagainya.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Pembukuan)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) mencakup informasi tentang kegiatan pemerintahan desa, pendapatan, dan pengeluaran, realisasi anggaran, pertanggungjawaban dana, serta evaluasi kinerja. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat laporan realisasi yang mencakup informasi tentang sejauh mana rencana dan kegiatan pemerintahan desa telah terealisasi atau dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPDes

mengenai laporan realisasi desa bukit makmur sudah berjalan dengan baik pada aplikasi siskeudes sesuai dengan pedoman BPKP tentang Aplikasi Siskeudes.

Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK)/ Laporan Pembukuan.

Catatan atas laporan keuangan desa juga dikenal dengan laporan pembukuan, yang merupakan dokumentasi yang menyajikan informasi secara rinci tentang transaksi keuangan dan aktivitas keuangan lainnya yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa di tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK)/ Laporan Pembukuan itu sudah termasuk ke dalam aplikasi siskeudes sesuai dengan pedoman BPKP. Dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi siskeudes sudah cukup efektif karena di Desa Bukit Makmur sendiri semua tahapan sudah dilakukan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan pihak yang membutuhkan. Dengan adanya aplikasi siskeudes ini, pemerintah Desa Bukit Makmur merasa terbantu karena memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dalam hal pelaporan ini akan dihasilkan laporan keuangan secara otomatis.

D. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa bahwa

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara belum terlaksana secara optimal karena disebabkan oleh tahap perencanaan dan tahap penatausahaan yakni berupa:

- a) Pada tahap perencanaan sudah sesuai dengan buku pedoman BPKP Siskeudes akan tetapi belum optimal karena masyarakat belum paham tentang RPJM Desa. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang tujuan, prioritas, dan program Pembangunan yang tercakup dalam RPJM Desa Bukit Makmur. Sehingga, Pemerintah Desa harus melakukan sosialisasi terkait RPJM Desa Bukit Makmur.
- b) Pada tahap perencanaan terkait Pembangunan RKP tidak sesuai dengan regulasi dana desa berjalan juga menjadi penyebab belum optimalnya penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), karena ketika ada pembangunan di desa, Pembangunan tersebut tidak ada di dalam aturan dana desa.
- c) Pada tahap penatausahaan belum terlaksana secara optimal, karena Berita acara dan surat pesanan masih dilakukan secara manual dan belum diintegrasikan ke dalam aplikasi siskeudes

Adapun Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah terlaksana yakni tahap penganggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban (pembukuan):

- a.) Pada tahap penganggaran yang telah terlaksana, dimana

Kantor Desa Bukit Makmur telah Menggunakan aplikasi siskeudes pada tahap peganggaran seperti Penyusunan dan Penjabaran APBDes sudah sesuai dengan buku pedoman (BPKP) Siskeudes.

- b.) Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban (pembukuan) telah terlaksana, dimana Kantor Desa Bukit Makmur telah Menggunakan aplikasi siskeudes pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban seperti CaLKA dan Laporan Pembukuan sesuai dengan Pedoman BPKP Siskeudes.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan diatas, maka berikut saran yang penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait:

1. Kantor Desa Bukit Makmur perlu mengadakan sosialisai khusus kepada masyarakat terkait RPJM Desa Bukit Makmur dan Memperkuat pengawasan terhadap RPJM dan RKP untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dana desa.
2. Segera mengembangkan modul khusus dalam aplikasi siskeudes yang memungkinkan untuk membuat, menyimpan, dan mengelola berita acara dan surat pesanan secara terintegrasi dengan proses penatausahaan dana Desa Bukit Makmur.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Abdullah. (1982). *Sistem Administrasi Keuangan Negara Jilid 1*. Jakarta:

Bhratara Karya Aksara.

Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.

Ichwan, M.2002. *Administrasi Keuangan Negara Suatu Pengantar Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RI) APBN*. Yogyakarta : Liberty.

Sumber e-Book:

BPKP. (2018). Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). *Bpkp.Go.Id*, 1–123.

Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>

Hayati, R. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi ...*, 5(2).
<https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i2.450>

Holmes Sianturi. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86–105.

Irawan, A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 55–67.
<https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.429>

Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1),

- 1–20.
<https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Pratiwi, D. N., & Muliastari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Rachma Nur Alifah, Z., Rifai, M., & Aryani, L. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang Studi Kasus: Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 612–622. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7068147>
- Rivan, A., & Maksum I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Rondonuwu, R., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. L. (2021). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 56–65. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.611>
- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>
- (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Universitas Tidar Magelang, 2022 DOI : <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Amelia Ningsih, Siti Nurhaliza, Evi Priyanti. “Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* DOI : <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>
- Arif Rivan, Irfan Ridwan Maksum. “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa” *Jurnal Administrasi Publik* DOI : <https://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Hadining, A. F., Ramayanti, C., & Rahma, M. (2021). Workshop Dan Pendampingan Penggunaan E-Government Berupa Siskeudes Kepada Aparatur Desa Di Kabupaten Karawang. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 527. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.4797>
- Hayati, R. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi* ..., 5(2). <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i2.450>
- Kinasih, Anasti Dwi Martantya. *Pengaruh*

Sumber Jurnal:

Alqi Faizah, Retnosari. “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Peran dan Kompetensi Perangkat Desa Serta Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas.
Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2019

Rondonuwu, Ridel, Tinneke EM Sumual, and Cecilia Lely Kewo. "Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* (2020): 56-65. DOI: <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.611>

Solikhah, Badingatus, Subowo Subowo, and A. Yulianto. "Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES)." *SNKPPM* 1.1 (2018): 434-438.

Peraturan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Aplikasi Siskeudes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah